

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, untuk membuat suatu penalaran dan asumsi-asumsi peneliti membutuhkan kajian-kajian ilmiah terdahulu untuk menganalisa data-data yang didapat. Dalam halnya penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori, antara lain.

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan peristiwa interaksi antara dua atau lebih aktor/pelaku yang saling melewati batas dari kedaulatan mereka masing-masing. Pada umumnya studi hubungan internasional merupakan suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Interaksi antara negara atau individu yang berasal dari negara yang berbeda disebut sebagai hubungan internasional. Interaksi ini dapat berupa hubungan politik, ekonomi, kebudayaan, dll.

Menurut Perwita dan Yani Hubungan internasional adalah suatu jenis interaksi antara aktor atau anggota suatu komunitas dengan aktor atau anggota komunitas lainnya yang melibatkan aktor-aktor dari kebangsaan yang berbeda melintasi batas-batas negara, dalam kaitannya dengan segala bentuk aktivitas manusia. Karena saling ketergantungan dalam masyarakat

internasional dan meningkatnya kompleksitas kehidupan manusia, membangun hubungan internasional sangat penting. Untuk memastikan setiap negara saling ketergantungan agar tidak memutuskan negara-negara dari dunia luar (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Cakupan ilmu hubungan internasional dalam tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya (Schwarzenberger dalam Perwita dan Yani, 2005 : 1). Mc. Clelland mendefinisikan Hubungan internasional sebagai suatu studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi (Mc. Clelland dalam Perwita dan Yani, 2005 : 4)

Seperti yang dicatat oleh Steve Smith dalam bukunya *The Study of International Relations, The State of the Arts*, perkembangan awal ilmu hubungan internasional ke dalam disiplin ilmu tersendiri baru dimulai sesaat setelah Perang Dunia I. Sebelum Perang Dunia I, studi hubungan internasional dipelajari secara eksklusif dalam berbagai ilmu, seperti hukum, sejarah, dan lain-lain. Bidang penelitian ilmiah lain tentang hubungan internasional saat ini adalah bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Pendekatan dari berbagai bidang ilmiah tidak cukup untuk memahami semua ilmu hubungan internasional yang sebenarnya. Dengan demikian, dewasa ini hubungan internasional tidak lagi dipandang sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri

tetapi sebagai suatu disiplin ilmu dengan perspektif tersendiri yang dapat menerjemahkan dan memahami teori-teorinya secara utuh.

Sebelumnya, Hubungan internasional hanya berfokus pada kajian mengenai perang dan damai saja, kemudian seiring dengan berkembangnya keilmuan Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu kian meluas untuk memahami perkembangan, perubahan, dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antarnegara di dunia internasional, akan tetapi masih bertitik berat kepada hubungan politik yang dikatakan sebagai “*high politics*”. Baru pada saat masa berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, kajian isu hubungan internasional sudah tidak hanya terfokus dengan *high politics* seperti keamanan saja. Namun telah meluas kepada isu *low politics* seperti HAM, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya yang tidak telah menjadi kajian tidak kalah pentingnya dengan isu *high politics*.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan isu-isu internasional, maka hubungan internasional sekarang ini tidak lagi hanya memfokuskan kepada hubungan politik yang berlangsung antarnegara saja, namun juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara (*non-state actors*).

Dengan perkembangan zaman yang dihasilkan dari perubahan isu-isu internasional, hubungan internasional tidak lagi hanya sebatas interaksi antara pemerintah negara saja. Namun, aktor lain seperti Lembaga non-

pemerintahan, perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan bahkan individu-individu juga dapat dikatakan sebagai aktor dari hubungan internasional yang saling memiliki kepentingan dalam dunia internasional. Selain itu, isu-isu hubungan internasional pada awalnya sangat berfokus pada isu-isu peperangan dan perdamaian (war and peace) kemudian terjadi perubahan pada akhir abad ke-19 menjadi terfokus pada isu-isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial, terorisme, dll. Karena perubahan inilah hubungan internasional dapat disebut sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang dan akan terus berkembang.

Menurut Andrias Darmayadi dalam buku Mengenal Studi Internasional, studi hubungan internasional bersifat interdisipliner, yang berarti ilmu hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari ilmu-ilmu sosial lain yang menjadi ilmu pembentuk dari hubungan internasional dan ada timbal balik dari ilmu hubungan internasional dengan ilmu-ilmu sosial lainnya (Darmayadi, 2015: 9-28).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam membuat atau merumuskan kebijakan luar negerinya. Konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau, antara lain : Pertama, perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan integritas teritorialnya, Kedua perlindungan terhadap identitas politik, dalam arti mampu mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya, Ketiga,

perlindungan terhadap budayanya, dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya. Kepentingan nasional suatu negara ialah hasil yang dibuat oleh para pembuat kebijakan sehingga kepentingan nasional suatu negara dapat berbeda atau bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepentingan nasional merupakan dasar utama dalam menentukan arah politik luar negeri suatu negara karena pada hakikatnya tujuan dari politik luar negeri adalah untuk mencapai keinginan dari masyarakatnya sebagai negara yang berdaulat. Hal ini menjadikan bahwa apapun kebijakan luar negeri yang dilakukan suatu negara di lingkungan internasional merupakan suatu Tindakan untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya.

Menurut Michael Roskin dikutip oleh Umar Suryadi Bakry dalam bukunya “Konsep-konsep Dasar Hubungan Internasional ” kepentingan nasional dapat dibagi menjadi dua berdasarkan cakupannya, yaitu kepentingan general dan kepentingan spesifik. Kepentingan general adalah kepentingan suatu negara yang diaplikasikan dalam wilayah geografis yang luas, seperti misalnya memelihara perdamaian dunia. Sementara kepentingan spesifik yang cakupan wilayahnya terbatas. Lebih lanjut Umar Suryadi Bakry menambahkan kepentingan nasional dapat dibagi lagi berdasarkan sifatnya, yaitu *Conflicting interest* dan *complementary*. *Conflicting interest* adalah kepentingan suatu negara yang berpotensi dapat menimbulkan konflik dengan negara lain. Sedangkan *Complementary*

interenst merupakan kepentingan nasional yang saling melengkapi dengan kepentingan negara lain (Bakry, 2017: 58-60).

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari pengertian ini para pemimpin negara dapat mengeluarkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pengertian dari Morgenthau ini sangat terkenal sehingga menjadi satu paradigma dominan dalam kajian politik internasional pasca Perang Dunia II. Morgenthau menyatakan bahwa kepentingan nasional semua negara adalah kekuatan segala sesuatu yang dapat membangun dan mempertahankan kontrol atau pengaruh suatu negara atas negara-negara lain.

Dalam perancangan kepentingan nasional perlu memperhatikan kemampuan negara yang memegang kekuasaan. Kekuasaan memainkan peran penting dalam menerapkan strategi kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, baik dalam hal kemampuan domestiknya maupun dalam hubungannya dengan negara lain, terangkum dalam apa yang disebut dengan kekuasaan (*power*). Kemampuan ini adalah definisi *power* yang statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan yang bersifat dinamis (Rudy, 2002: 116, dikutip Senno Ariga 2019).

Kapabilitas dari suatu bangsa itu sendiri dapat diukur dari ketahanan dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dengan pertahanan karena mengandung pengertian ketahanan yang terintegrasi pada seluruh aspek kehidupan nasional, termasuk ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara (Rudy, 2002: 116, dikutip Senno Ariga 2019).

2.1.3 Ekonomi Politik Internasional

Negara dan pasar menjadi dua faktor yang tidak terpisahkan dalam perkembangannya. Implikasinya adalah bahwa politik, diwakili oleh negara, dan ekonomi yang diwakili oleh pasar, dari yang tak terbantahkan tentu saja, saling terkait. Ekonomi berkaitan erat dengan perolehan kekayaan, sedangkan politik erat kaitannya dengan perolehan kekuasaan atau kekuasaan. Di tingkat internasional, negara dan pasar merupakan pusat ekonomi politik internasional (Sorensen, 2005).

Ekonomi politik, menurut Adam Smith, adalah “cabang ilmu seorang negarawan atau pembuat undang-undang” dan pedoman untuk mengatur perekonomian nasional (Gilpin, 1987). Sementara itu, menurut Mochtar Mas’oed, ekonomi politik berfokus pada studi tentang hubungan dan interaksi antara fenomena politik dan ekonomi, antara negara dan pasar, dan antara lingkungan domestik, dan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dan masyarakat (Mas’ed, 2008). Inti dari diskusi EPI adalah

interaksi pasar dan aktor politik di dalamnya. Diskusi ekonomi politik internasional muncul dari tidak cukupnya studi ekonomi untuk menjelaskan pertanyaan mengenai distribusi aktivitas ekonomi internasional dan aktor politik yang mempengaruhinya. Hal ini harus dilihat dari batas-batas politik negara, yang nantinya dapat menggambarkan kebijakan ekonomi suatu negara terhadap negara lain.

Dalam ekonomi politik internasional, jelas ada kontradiksi antara tumbuhnya saling ketergantungan ekonomi internasional dan keinginan Negara untuk mengatur ketergantungan ekonomi dan otonomi politik. Karena pada saat yang sama, Negara menginginkan keuntungan maksimal dari perdagangan bebas. membawa bangsa lain, tetapi di sisi lain, negara juga ingin melindungi otonomi politik, nilai-nilai budaya dan struktur sosialnya (Gilpin, 1987). Operasi negara dapat dikatakan mengikuti logika sistem pasar, dimana pasar secara geografis diperluas dan kerjasama antar negara dalam berbagai aspek diperluas sesuai dengan mekanisme harga, Inilah ekonomi politik internasional.

Ekonomi Politik Internasional menurut Oatley (2006) adalah studi tentang bagaimana kepentingan ekonomi dan proses politik berinteraksi untuk membentuk kebijakan pemerintah. Ekonomi politik internasional mempelajari kehidupan dalam ekonomi global dengan berfokus pada perjuangan politik antara yang kuat dan yang lemah di pasar ekonomi global. Pertukaran ekonomi global ini meningkatkan pendapatan dan juga mengurangi pendapatan orang lain, untuk menggunakan istilah "Ekonomi

Politik Global" oleh Gilpin (2005) sebagai interaksi pasar dan aktor kuat seperti negara, perusahaan multinasional dan organisasi internasional.

Konsekuensi distributif dari pasar ekonomi global ini adalah munculnya persaingan politik di tingkat nasional dan internasional, di mana yang kuat mencari lebih banyak "koneksi" dalam ekonomi global untuk meningkatkan pendapatan mereka, sementara yang lemah berusaha untuk menghilangkan kendala ekonomi di tingkat global dan nasional. Ekonomi politik internasional mempelajari bagaimana perjuangan politik yang dimainkan antara yang kuat dan yang lemah dalam ekonomi global membentuk perkembangan ekonomi global. (Oatley, 2006)

Para pemikir hubungan internasional mencoba menjelaskan bagaimana interdependensi ekonomi mendorong negara-negara untuk terus bekerja sama. Robert Gilpin kemudian berupaya mengidentifikasi keberadaan perusahaan multinasional sebagai aktor kunci dalam mendorong negara-negara untuk terlibat dalam kerja sama ekonomi. Kegiatan perusahaan multinasional memungkinkan pertukaran modal, barang dan jasa lintas batas negara dalam waktu yang relatif singkat, sehingga memperkuat kerjasama ekonomi antar negara. Sejak saat itu, ilmu ekonomi mulai mempengaruhi kajian hubungan internasional. (Hermawan, 2007 : 6)

Ekonomi politik dalam kajian hubungan internasional memerlukan metode pendekatan. Metode pendekatan adalah prosedur yang digunakan

dalam proses penelitian, pengamatan dan analisis ekonomi politik dari perspektif internasional. Hal ini terkait dengan penerapan ilmu secara kontekstual.

Pendekatan ekonomi politik internasional bukanlah disiplin ilmu yang tunggal. Singkatnya, implementasi perangkat analisis dapat dilihat dari berbagai teori dan konsep yang mendasari substansi ekonomi politik, seperti interdependensi, ketergantungan, keterbelakangan, pertumbuhan, dan pembangunan. Sistem ekonomi termasuk isu-isu seperti pembangunan sosial-ekonomi, politik kekuasaan, realisme dan idealisme, linierisme dan strukturalisme internasional, globalisasi atau regionalisme (Ikbar, 2002 : 21).

Gilpin mengemukakan ada tiga unsur dasar dalam isu-isu ekonomi politik. Tiga unsur tersebut adalah; 1) penyebab dan hal-hal yang mempengaruhi kebangkitan pasar; 2) hubungan antara perubahan ekonomi dan perubahan politik; dan 3) Signifikansi ekonomi pasar dunia terhadap ekonomi domestik (Ikbar, 2002 : 19).

Secara umum dapat kita lihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara dunia politik dan dunia bisnis. Mempertimbangkan beberapa pendapat yang berbeda dari para ahli tentang bagaimana memahami ekonomi politik, didefinisikan di sini sebagai sistem yang menghasilkan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi kekayaan. Politik, di sisi lain, adalah

seperangkat institusi dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi.

2.1.4 Bisnis Internasional

Bisnis internasional adalah perdagangan yang dilakukan di luar batas suatu negara. Transaksi komersial tersebut merupakan 4.444 transaksi perdagangan internasional (international trade). Di sisi lain, transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di satu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain dikenal sebagai pemasaran internasional.

Bisnis Internasional merupakan suatu bidang kajian yang membahas tentang fenomena hubungan ekonomi internasional dimana negara dan aktor non-negara terlibat dalam sebuah kegiatan transaksi bisnis antarnegara (Hadiwinata, 2002:26). Studi bisnis internasional mulai berkembang sejak akhir PD II dan memberi dimensi baru bagi studi ekonomi dan manajemen. Salah satu disiplin ilmu yang dianggap dekat dengan studi bisnis internasional, adalah ekonomi internasional dan perdagangan internasional. Bisnis internasional, fokus perhatiannya adalah pelaku (perusahaan) yang memainkan peran dalam bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain dan melewati batas-batas negara. Transaksi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat melibatkan masing-masing perusahaan, kelompok perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah.

Bisnis internasional tidak bisa dihindari. Mengingat, tidak ada negara di dunia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya dengan barang dan produk yang dihasilkannya sendiri. Saat ini, hampir semua perusahaan, besar atau kecil, dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa global dan persaingan karena produk menjual sebagian pemasokan dari negara asing dan bersaing dengan produk dan layanan yang berasal dari luar negeri. Suatu negara ataupun suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis internasional baik dalam bentuk perdagangan internasional pada umumnya dan memiliki beberapa pertimbangan ataupun alasan. Pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan ekonomis, politik ataupun sosial budaya bahkan tidak jarang atas dasar pertimbangan militer. Keadaan ini yang menentukan dilaksanakannya bisnis ataupun perdagangan internasional.

Menurut Sukardi & Sari (2007) dalam buku *Bisnis Internasional* mengemukakan bahwa: “Bisnis dalam arti luas adalah semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis itu sendiri dapat dipandang sebagai sebuah sistem menyeluruh yang menggabungkan sub-sistem yang lebih kecil yang disebut industri. Artinya setiap industri dibentuk dari banyak perusahaan yang terdiri dari berbagai ukuran perusahaan dengan produk yang dihasilkannya”(Sukardi & Sari 2007:1).

Menurut Jeff Madura (2007) melalui buku *Pengantar Bisnis Edisi 4* bahwa: “Bisnis didirikan untuk melayani kebutuhan pelanggan oleh pemilik yang mencoba untuk memperoleh laba. Orang-orang yang menciptakan

bisnis melihat suatu kesempatan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang belum ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan lain” (Madura, 2007:6).

Dengan uraian diatas berusaha menjelaskan bahwa bisnis sebagai aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memuaskan konsumen serta untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau perusahaannya melalui proses transaksi.

Menurut Ball, McCulloch, Frantz, Geringer, Minor (2007) melalui buku *International Business* mendefinisikan bahwa: “Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batasbatas negara. Defenisi tersebut mencakup perdagangan internasional, pemanufakturan diluar negeri juga industri jasa diberbagai bidang seperti transportasi, parawisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan besar dan komunikasi masa” (Ball, 2007:192).

Suatu negara/perusahaan yang melakukan transaksi bisnis internasional berupa perdagangan internasional biasanya memiliki beberapa pertimbangan atau alasan, antara lain pertimbangan ekonomi, politik atau sosial budaya dan seringkali didasarkan pada pertimbangan militer. Perdagangan internasional sangat penting karena memang tidak ada negara di dunia yang dapat memenuhi semua kebutuhannya dari barang atau produk yang dihasilkan oleh negara tersebut. Tidak ada negara yang bisa menjamin swasembada 100%. Hal ini disebabkan tidak meratanya

distribusi sumber daya baik sumber daya alam, modal maupun sumber daya manusia. Kesuburan tanah juga akan bervariasi dari satu negara ke negara lain, dengan beberapa negara menanam tanaman tertentu sementara di negara lain tidak dapat menanam tanaman yang benar-benar dibutuhkan. Keadaan ini menentukan bisnis atau perdagangan internasional yang akan dilakukan.

Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut jika memiliki monopoli dalam produksi dan penjualan suatu produk. Hal ini akan tercapai jika tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut, sehingga negara tersebut menjadi produsen tunggal, hal ini biasanya disebabkan oleh kondisi alamnya, misalnya pertambangan, penghijauan, kehutanan, pertanian, dll.

Sementara keunggulan komparatif adalah situasi di mana satu negara memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memasok suatu produk daripada negara lain karena memiliki harga yang lebih rendah, lebih bermutu, penyediaan lebih baik, stabilitas politik ekonomi yang baik dibandingkan negara lain yang memiliki produk serupa.

Jadi, bisnis internasional sebagai perusahaan atau sesuatu yang bernilai komersial baik dalam sektor swasta maupun publik yang berhubungan dengan penciptaan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Bisnis internasional dapat terjadi diberbagai bidang.

2.1.5 Diversifikasi Ekonomi

Menurut Tjiptono (2007, dikutip Tengku Putri Lindung Bulan 2017), strategi diversifikasi produk adalah suatu upaya mencari dan mengembangkan produk atau pasar yang baru, atau keduanya, dalam rangka mengejar pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas dan fleksibilitas.

Menurut Kotler (dikutip oleh Pretty Angelia Wuisan 2022) pengertian diversifikasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kinerja bisnis. Cara meningkatkan kinerja bisnis ini dengan mengidentifikasi peluang untuk menambah lini bisnis yang tidak berkaitan dengan bisnis perusahaan saat ini.

Sementara menurut Effendi (1996, dikutip M. Taufiq Bupi Aldiva 2019) mengartikan diversifikasi produk sebagai suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pengembangan produk melalui penambahan jenis produk dengan tipe, model dan ukuran yang beragam dengan harapan meningkatkan laba secara maksimal.

Dalam halnya penelitian ini, PIF berusaha melakukan diversifikasi ekonomi Arab Saudi berdasarkan *Saudi Vision 2030* dengan membagi-bagi asset sumber ekonomi Arab Saudi ke berbagai sektor termasuk sektor olahraga dengan diakuisisinya Newcastle United.

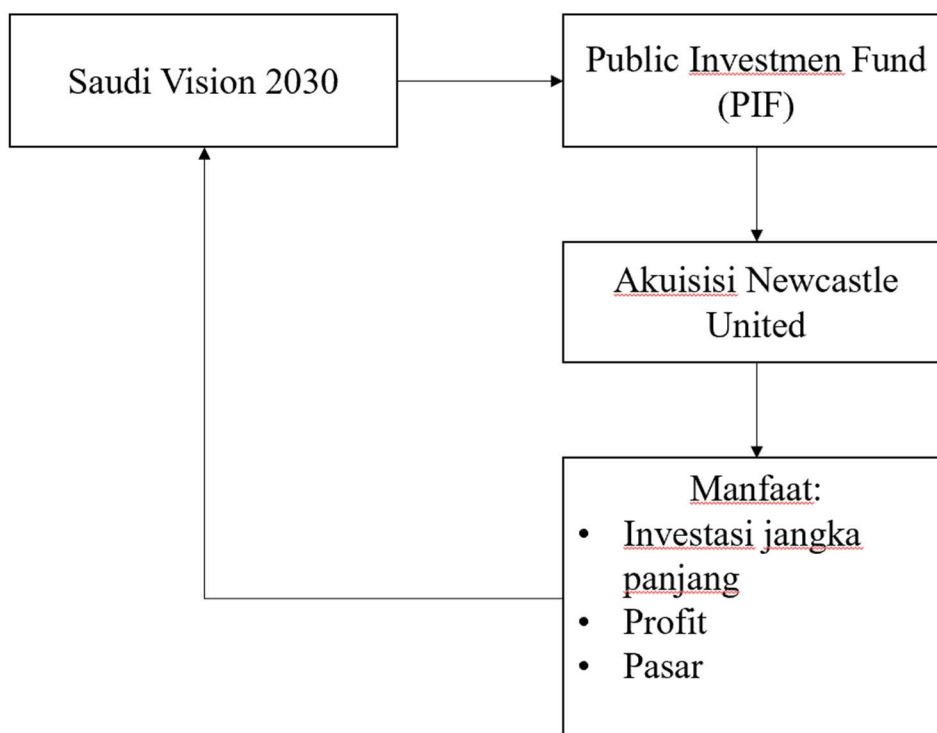
2.1.6 Akuisisi

Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan di mana perusahaan yang mengakuisisi memperoleh sebagian saham dari perusahaan yang

diakuisisi, kendali atas perusahaan yang diakuisisi dialihkan ke perusahaan yang mengakuisisi, dan perusahaan tetap merupakan badan hukum yang terpisah. (Sudana, 2011, dikutip Ervianti Alifah 2021).

Dalam proses akuisisi, perusahaan pengakuisisi perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi seleksi perusahaan yang akan diakuisisi, antara lain: aspek keuangan atau biaya akuisisi, pemahaman akan kompleksitas tahap integrasi serta integrasi setelah akuisisi (Hamidah & Noviani, 2013, dikutip Ervianti Alifah 2021). Dari keterangan diatas, akuisisi merupakan proses pengambilalihan saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain, sehingga perusahaan yang diambil sahamnya tersebut menjadi anak perusahaan lain.

2.2 Kerangka Pemikiran



Bagan 2.1
Kerangka Pemikiran

Perkembangan zaman pada era global dan berkembangnya isu-isu hubungan internasional telah menempatkan aktor non negara sebagai peran penting dalam dunia hubungan internasional termasuk perusahaan atau institusi internasional bentukan negara yang memiliki tujuan membantu negaranya untuk mencapai kepentingan nasional, dalam halnya penelitian ini ialah PIF.

PIF sebagai Lembaga investasi Arab Saudi diberi wewenang untuk ikut mewujudkan Saudi Vision 2030 melalui diservikasi ekonomi di sektor investasi pada berbagai sektor. PIF berhasil melakukan akuisisi terhadap klub Inggris Newcastle United. Dimana pada akuisisi Newcastle United oleh PIF ini terdapat

beberapa manfaat yang akan menjadi *feedback* atau hasil yang akan mendukung terwujudnya Saudi Vision 2030.

Dari kepemilikan PIF atas Newcastle United dapat dikaji menggunakan beberapa teori diantaranya: teori hubungan internasional, kepentingan nasional, ekonomi politik internasional, bisnis internasional, diservikasi ekonomi, dan akuisisi. Kemudian akan ditelusuri bagaimana pengaruhnya dari diakuisisinya Newcastle United oleh PIF terhadap upaya terwujudnya *Saudi Vision 2030*.